

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan IPH Kabupaten Aceh Besar Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kondisi **inflasi cukup tinggi dan berkelanjutan**, dengan total perubahan sebesar 25,77% dan rata-rata mingguan 1,98%. Kondisi ini memerlukan penguatan langkah stabilisasi harga, terutama pada periode Agustus-September yang menjadi puncak tekanan inflasi, seperti halnya yang digambarkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL INDEK PERUBAHAN HARGA (IPH) KABUPATEN ACEH BESAR
TRIWULAN III TAHUN 2025

Tabel 1. Perubahan IPH Triwulan III

No	Bulan	Minggu ke-	Perubahan IPH (%)
1	Juli	1	-1.18
2	Juli	2	-0.87
3	Juli	3	0.10
4	Juli	4	0.92
5	Juli	5	1.68
6	Agustus	1	4.28
7	Agustus	2	3.68
8	Agustus	3	2.95
9	Agustus	4	2.37
10	September	1	2.05
11	September	2	2.82
12	September	3	3.45
13	September	4	3.52
		Total	25.77
		Rata-rata	1.98

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar selama Triwulan III Tahun 2025, perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) menunjukkan

kecenderungan meningkat dengan tekanan inflasi yang cukup kuat, terutama pada bulan Agustus hingga September.

Pada bulan Juli 2025, IPH Kabupaten Aceh Besar masih menunjukkan kondisi yang relatif beragam. Pada minggu pertama dan kedua tercatat penurunan IPH masing-masing sebesar -1,18 persen dan -0,87 persen, yang mencerminkan masih berlanjutnya tekanan deflasi dari triwulan sebelumnya. Namun, mulai minggu ketiga hingga minggu kelima, IPH berbalik mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,10 persen, 0,92 persen, dan 1,68 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya fase pemulihan harga serta mulai meningkatnya tekanan permintaan.

Memasuki bulan Agustus 2025, IPH Kabupaten Aceh Besar mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan konsisten di seluruh minggu pengamatan. Perubahan IPH tercatat sebesar 4,28 persen pada minggu pertama, 3,68 persen pada minggu kedua, 2,95 persen pada minggu ketiga, dan 2,37 persen pada minggu keempat. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya tekanan inflasi yang signifikan, yang diduga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan terhadap komoditas tertentu serta potensi keterbatasan pasokan.

Selanjutnya, pada bulan September 2025, tekanan inflasi masih berlanjut dengan kecenderungan meningkat. IPH tercatat sebesar 2,05 persen pada minggu pertama, 2,82 persen pada minggu kedua, 3,45 persen pada minggu ketiga, dan 3,52 persen pada minggu keempat. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan kenaikan harga belum mereda hingga akhir triwulan.

Secara kumulatif, total perubahan IPH Kabupaten Aceh Besar selama Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 25,77 persen dengan rata-rata perubahan mingguan sebesar 1,98 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar mengalami inflasi yang cukup tinggi pada Triwulan III, sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah.

TPID Kabupaten Aceh Besar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keterjangkauan harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta meningkatkan komunikasi efektif kepada masyarakat. Ke depan, TPID juga akan meningkatkan intensitas pemantauan terhadap komoditas strategis dan mengoptimalkan berbagai bentuk intervensi pasar guna menekan tekanan inflasi, khususnya pada periode dengan risiko kenaikan harga yang tinggi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Di lihat dari perkembangan IPH triwulan III di Kabupaten Aceh Besar yaitu inflasi yang tinggi dan berkelanjutan serta lonjakan harga tajam pada bulan Agustus dan volatilitas harga yang masih tinggi yang menunjukkan perlunya penguatan Langkah antisipatif, stabilisasi pasokan dan pengendalian permintaan. Identifikasi permasalahan pada triwulan III disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Peningkatan permintaan masyarakat
2. Keterbatasan pasokan beberapa komoditas strategis
3. Distribusi belum optimal

Gangguan sementara pasokan

- 4.
 5. Lonjakan permintaan musiman
 6. Keterlambatan distribusi
 7. Ketidakseimbangan supply demand
 8. Lemahnya mekanisme stabilisasi
 9. Pola musimam berulang
 10. Antisipasi belum optimal
 11. SOP respon cepat belum optimal
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Kadis PUPR Aceh Besar serta Camat Darussalam meninjau Kawasan persawahan Blang Tamak di Gampong Lamtimpeung Kecamatan Darussalam dalam rangka melihat kendala pengairan yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerjasama dengan Perum Bulog Kanwil Aceh menggelar Pangan Murah di halaman kantor Camat Darul Imarah.
3. Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri menghadiri pembukaan berdikari tani BNNP dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh dalam rangka mendukung semangat kelompok tani untuk terus giat dalam Bertani dan menjaga ketahanan pangan yang dilaksanakan di gampong Leungah Kecamatan Seulimeum. Rabu, 23 Juli 2025
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkerjasama dengan Disperindah Aceh dan Perum Bulog Kanwil Aceh menggelar Operasi Pasar Khusus Komoditi Besar di Kecamatan Ingin Jaya. Selasa, 29 Juli 2025.
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkerjasama dengan Disperindah Aceh dan Perum Bulog Kanwil Aceh menggelar Operasi Pasar Khusus Komoditi Besar di Kecamatan Baitussalam. Selasa, 29 Juli 2025.
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkerjasama dengan Disperindah Aceh dan Perum Bulog Kanwil Aceh menggelar Operasi Pasar Khusus Komoditi Besar di Kecamatan Kuta Baro. Rabu, 30 Juli 2025
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bekerja sama dengan Bulog Kanwil Aceh menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Kecamatan Seulimeum dan halaman Kanto Camat Kecamatan Lembah Seulawah. Selasa, 5 Agustus 2025
8. Dinas Pangan Aceh Besar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Kecamatan Montasik dan halaman Kanto Camat Kecamatan Kuta Malaka
9. Dinas Pangan Aceh Besar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang dilaksanakan di halaman Kantor Camat Kecamatan Lhoong.
10. Dinas Pangan Aceh Besar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan (GPM-SPHP) yang dilaksanakan di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah.

Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri mendampingi Wakil Gubernur Fadhlullah dalam

11. rangka peluncuran Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai penyalur pupuk bersubsidi yang dilakukan di gampong Aneuk Glee Kecamatan Indrapuri. Sabtu, 16 Agustus 2025.
12. Dinas Pangan Aceh Besar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan (GPM-SPHP) sekaligus memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pangan Aceh Besar. Minggu, 17 Agustus 2025
13. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar kerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Aceh melakukan Gerakan pangan murah di Kecamatan Pulo Aceh dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jum'at, 23 Agustus 2025.
14. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Besar melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi terkait pemantauan harga dan distribusi bahan pokok. Kamis, 4 September 2025
15. Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengikuti rapat pembahasan program kerja Dekranasda Aceh Besar sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif sekaligus lokasi berbagai event yang melibatkan UMKM, perajin dan komunitas budaya. Selasa, 16 September 2025
16. Dinas Pangan Aceh Besar menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan (GPM-SPHP) yang dilaksanakan di Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah, Sabtu 20 September 2025
17. Kadis Pangan Aceh Besar Alyadi S.Pi.,MM membuka sosialisasi keamanan pangan guna mewujudkan program ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 sebagai Langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks dan juga sejalan dengan peraturan presiden nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumberdaya lokal.
18. Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar, membuka kegiatan gelar edukasi kemitraan dan teknologi better life farming di gampong Teurebeh, Kecamatan Kota Jantho.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan gerakan menanam di pekarangan rumah maupun pemanfaatan lahan kosong secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang perlu dievaluasi efektivitasnya melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis.
2. Kalau ada Indikasi ketidakseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) perlu didukung oleh ketersediaan data neraca pangan yang akurat dan diperbarui secara berkala, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat dirumuskan secara tepat sasaran serta dievaluasi berdasarkan perkembangan stok dan harga.
3. Menambah dan memperluas jaringan alternatif dengan daerah pemasok bahan pangan yang terjangkau guna meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik, yang selanjutnya perlu dievaluasi melalui penurunan disparitas harga dan kelancaran pasokan antarwilayah.
4. Mendorong peningkatan kemampuan manajemen usaha, baik dalam pengelolaan

barang maupun keuangan, khususnya bagi pelaku usaha pangan, sebagai bagian dari penguatan rantai pasok, serta dievaluasi melalui peningkatan kapasitas usaha dan stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.

5. Memperkuat kerja sama antar daerah kabupaten serta meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, yang perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan efektivitas koordinasi, realisasi program, dan dampaknya terhadap stabilitas harga.
6. Upaya menjaga ketersediaan pasokan melalui koordinasi dengan distributor dan wilayah pemasok telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya lonjakan harga, terutama pada awal Agustus. Hal ini mengindikasikan bahwa cadangan pangan dan mekanisme buffer stock masih perlu diperkuat.
7. Pelaksanaan operasi pasar dan pemantauan harga secara berkala membantu menahan kenaikan harga lanjutan serta mendorong terjadinya deflasi moderat. Meski demikian, volatilitas harga antar minggu masih relatif tinggi.
8. Distribusi komoditas secara umum berjalan relatif lancar, tercermin dari kemampuan pasar melakukan penyesuaian harga setelah periode tekanan. Namun, pada periode puncak permintaan, distribusi masih memerlukan penguatan.
9. Sosialisasi kepada masyarakat terkait harga dan ketersediaan komoditas telah dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu membentuk ekspektasi harga yang stabil.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

- Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas penting.
- Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar dan produksi pangan secara mandiri oleh
- Melaporkan Laporan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) secara harian kepada Inspektur di Daerah dalam rangka penanganan inflasi di Daerah.
- Melakukan 6 Upaya Konkrit dalam Penanganan Inflasi di Daerah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Nomor 143/ PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam penanganan Dampak inflasi di daerah, yaitu:
 1. Melakukan operasi pasar murah;
 2. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 3. Kerjasama dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 4. Melakukan Gerakan Menanam;
 5. Merealisasikan Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Dan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Kabupaten Aceh Besar;
 6. Dukungan Transportasi dari APBD.